



Kapasitas Pemerintah Desa Tanjung Harapan dalam Mencapai Status Desa Mandiri Tahun 2023

Dhea Amanda¹, Kustiawan², Uly Sophia³
^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Dompok Tanjungpinang

Korespondensi penulis: adhea0510@gmail.com

Abstract. *Independent village status is the highest achievement in the classification of village development that shows strong social, economic and environmental resilience. Tanjung Harapan Village is the only village in Lingga Regency designated as an independent village in 2023. This study aims to analyze the capacity of the Tanjung Harapan Village Government in achieving this status using the organizational capacity theory of Horton et al. (2003), which emphasizes two main aspects, namely resources and management. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that in terms of resources, the village has adequate infrastructure and has begun to apply digital systems in administrative management, although there are still network constraints. In terms of management, the village head applies open leadership, involves the community in planning, and manages finances transparently. Capacity building of village officials is also carried out through training and periodic evaluations. In conclusion, the Tanjung Harapan Village Government has demonstrated adequate capacity to support the achievement of independent village status. However, there is a need to increase cross-sectoral cooperation and strengthen digital infrastructure to support the sustainability of village development.*

Keywords: *Independent Village, Village Government Capacity, Resources, Management*

Abstrak. Status desa mandiri merupakan capaian tertinggi dalam klasifikasi pembangunan desa yang menunjukkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kuat. Desa Tanjung Harapan menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Lingga yang ditetapkan sebagai desa mandiri pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas Pemerintah Desa Tanjung Harapan dalam mencapai status tersebut dengan menggunakan teori kapasitas organisasi dari Horton et al. (2003), yang menekankan pada dua aspek utama yaitu sumber daya dan manajemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sumber daya, desa memiliki infrastruktur yang memadai serta mulai menerapkan sistem digital dalam pengelolaan administrasi meskipun masih terdapat kendala jaringan. Dari aspek manajemen, kepala desa menerapkan kepemimpinan terbuka, melibatkan masyarakat dalam perencanaan, serta mengelola keuangan secara transparan. Peningkatan kapasitas perangkat desa juga dilakukan melalui pelatihan dan evaluasi berkala. Kesimpulannya, Pemerintah Desa Tanjung Harapan telah menunjukkan kapasitas yang memadai dalam mendukung pencapaian status desa mandiri. Namun, diperlukan peningkatan kerja sama lintas sektor dan penguatan infrastruktur digital untuk mendukung keberlanjutan pembangunan desa.

Kata kunci: Desa Mandiri, Kapasitas Pemerintah Desa, Sumber Daya, Manajemen

1. LATAR BELAKANG

Desa sebagai komponen terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia mempunyai peran yang vital dalam mewujudkan perkembangan yang merata serta sejahtera bagi seluruh rakyat. Untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat desa, pemerintah Indonesia telah mengembangkan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai instrumen untuk menilai kemajuan dan kemandirian desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016

terkait Indeks Desa Membangun (IDM). IDM adalah indeks gabungan yang meliputi Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Indeks ini kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan desa ke dalam lima status, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Hal ini sejalan dengan nawa cita Presiden Joko Widodo, yang menghendaki pembentukan Indonesia yang berdaulat dan mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong (Kurniawan, 2015). Salah satu misi utama dalam Nawa Cita ketiga adalah “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 mengenai Indeks Desa Membangun, desa mandiri merupakan desa yang telah maju dalam aspek teknologi dan memiliki kecakapan untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan, dengan maksud untuk memperbaiki taraf hidup dan kemakmuran masyarakatnya (Kemendes PDTT RI 2016). Desa Mandiri dapat dicapai apabila memenuhi standar Indeks Desa Membangun (IDM), seperti indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan memfokuskan pembangunan di tingkat desa, maka akan dapat memperkuat fondasi ekonomi dan sosial masyarakat di level terbawah. Menurut Kushartono hal ini juga akan mengurangi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan, sehingga pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat (Suherman & Rohaeni 2023).

Kepulauan Riau merupakan provinsi yang memiliki lima kabupaten yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas serta memiliki dua Kota yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 mengenai Penetapan dan Pembaruan Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021, Kepulauan Riau terdiri dari 76 kecamatan, 142 kelurahan, dan 275 desa (Kemendagri 2022). Dari total 275 desa tersebut, terdapat 24 desa yang dikategorikan Sebagai desa mandiri, 100 desa sebagai desa maju, dan 151 desa sebagai desa berkembang (Kemendes PDTT RI 2023).

Tabel 1. 1 Desa Mandiri Kepulauan Riau Tahun 2023

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nilai IDM 2023
Bintan	Telok Sebong	Ekanq Anculai	0,8171
Bintan	Toapaya	Toapaya Selatan	0,8194
Karimun	Buru	Tanjung Batu Kecil	0,8229
Karimun	Buru	Tanjung Hutan	0,8395

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nilai IDM 2023
Karimun	Durai	Telaga Tujuh	0,8859
Karimun	Kundur	Sungai Sebesi	0,8195
Karimun	Kundur	Sungai Ungar	0,8698
Karimun	Kundur Utara	Perayun	0,8468
Karimun	Kundur Utara	Sungai Ungar Utara	0,8395
Karimun	Meral Barat	Pangke	0,8432
Karimun	Meral Barat	Pangke Barat	0,9121
Karimun	Tebing	Pongkar	0,8657
Kep. Anambas	Jemaja	Batu Berapit	0,8340
Kep. Anambas	Palatak	Ladan	0,9192
Kep. Anambas	Palatak	Putik	0,8857
Kep. Anambas	Palatak	Tebang	0,8302
Kep. Anambas	Siantan	Tarempa Selatan	0,8305
Kep. Anambas	Siantan	Tarempa Barat	0,8932
Kep. Anambas	Siantan Timur	Batu Belah	0,8302
Kep. Anambas	Siantan Utara	Piasan	0,8254
Lingga	Singkep	Tanjung Harapan	0,8767
Natuna	Bunguran Batubi	Gunung Putri	0,8221
Natuna	Bunguran Timur	Sepempang	0,8771
Natuna	Pulau Tiga Barat	Pulau Tiga	0,8970

Sumber: Kepmendesa PD TT Nomor 174 Tahun 2023 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 5 Kabupaten yang ada di Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga menjadi kabupaten yang hanya memiliki satu desa dengan status mandiri, yaitu Desa Tanjung Harapan. Kabupaten Lingga sendiri memiliki 75 desa dengan jumlah desa dengan status mandiri 1 desa, desa maju 15 desa, dan desa berkembang 59 desa. Pada penelitian ini, fokus penelitian penulis adalah Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Desa Tanjung Harapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Tanjung Harapan yang terletak di Kecamatan Singkep. Secara administratif, wilayah Desa Tanjung Harapan dibatasi oleh desa-desa di sekitarnya dan laut. Di utara, desa ini berbatasan dengan Desa Berindat, di selatan berbatasan dengan Kelurahan Dabo Singkep, di barat dengan Kelurahan Sungai Lumpur, dan di timur berbatasan dengan laut.

Mengacu pada Kepmendesa PD TT RI Nomor 174 Tahun 2023 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2023, Desa Tanjung Harapan memperoleh nilai Indeks Desa Membangun sebesar 0,8767. Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing aspek, Desa Tanjung Harapan memiliki nilai rata-rata indeks tertinggi pada aspek ketahanan Lingkungan

dengan nilai rata-rata indeks 0,9333. Sedangkan untuk indeks ketahanan sosial dan indeks ketahanan ekonomi masing-masing mendapatkan skor 0,8800 dan 0,8167 (Kemendes PDTT RI 2023).

Pencapaian status desa mandiri tahun 2023 ini tidak terlepas dari kapasitas Pemerintah Desa Tanjung Harapan sendiri. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan bentuk pengakuan desa yang menjelaskan peran dan otoritas desa untuk menguatkan masyarakat desa sebagai pelaku perkembangan, tidak lagi menjadi penerima (Priyono et al. 2019). Adanya otonomi desa memberikan kekuasaan kepada desa untuk menata urusan pemerintahan dan mengelola kepentingan warga sekitar, sekaligus memberikan kesempatan untuk desa dalam meningkatkan sumber daya yang tersedia (Garvera, Arifin, and Fazrilah 2021). Artinya desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Karenanya kapasitas yang dimiliki pemerintah desa menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan desa mandiri. Dalam rangka mempercepat proses kemandirian desa, Pemerintah Desa harus mengoptimalkan ketersediaan sumber daya (alam dan manusia), kapasitas organisasi, perencanaan dan pelaksanaan program, serta kelembagaan desa (Kurniawan 2015). Kesiapan merupakan faktor penting bagi masyarakat dan organisasi dalam mengadopsi perubahan untuk meningkatkan status desa menuju kemandirian. Kesiapan dalam konteks ini berkaitan dengan inisiatif pemerintah desa dalam mengelola dan menata pemerintahan desa untuk meningkatkan posisinya menuju kemandirian (Anjelita, Budiman, and Jumansyah 2020).

Penulis telah melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang status desa mandiri, seperti Paula Agustina (2020) yang meneliti strategi Desa Toapaya Selatan dalam menuju desa mandiri melalui penyederhanaan administrasi, penguatan SDM, serta pembangunan desa wisata yang didukung letak strategis desa. Tauhid (2022) meneliti Desa Malang Rapat yang fokus pada ketahanan ekonomi, namun masih menghadapi kendala pada keragaman produksi dan minimnya pendampingan. Sementara itu, Aisah dan Herdiansyah (2019) mengkaji pemberdayaan masyarakat Desa Haurngombong dalam program Desa Mandiri Energi melalui pemanfaatan biogas, meskipun masih terkendala dalam aspek teknis dan pembiayaan. Ketiga penelitian tersebut berfokus pada strategi dalam mewujudkan desa mandiri, namun belum ada yang secara khusus membahas kapasitas pemerintah desa dalam pencapaian status tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kapasitas Pemerintah Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga dalam mencapai status desa mandiri pada tahun 2023.

2. KAJIAN TEORITIS

Kapasitas diartikan sebagai kemampuan individu, organisasi, atau sistem dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara efektif dan efisien ” (Utama et al. 2020). Milen (2004) menambahkan bahwa kapasitas mencakup keahlian yang memungkinkan pelaksanaan fungsi secara berkelanjutan (Setiawan, Wulandari, and Munawaroh 2024). Sementara itu, (Horton et al. 2003) menyatakan bahwa kapasitas organisasi adalah potensi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kapasitas merujuk pada kemampuan fungsional yang dimiliki oleh individu maupun institusi dalam mencapai tujuan.

Penelitian ini menganalisis kapasitas pemerintah tanjung harapan dalam mencapai status desa mandiri menggunakan teori kapasitas organisasi oleh (Horton et al. 2003). Menurut Horton et al. 2003, kapasitas organisasi terdiri dari dua elemen utama, yaitu sumber daya dan manajemen. Sumber daya mencakup aspek fisik dan material seperti infrastruktur, teknologi, keuangan, dan SDM. Sementara itu, manajemen mencakup tiga aspek penting: kepemimpinan strategis yang menetapkan arah dan menggerakkan organisasi; manajemen program dan proses yang memastikan efektivitas pelaksanaan tugas serta pengelolaan sumber daya internal; dan jaringan serta hubungan yang mendukung kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam lingkungan organisasi yang terus berubah. Ketiga aspek manajemen ini saling berkaitan dan menjadi faktor penentu dalam membangun kapasitas organisasi secara menyeluruh. Penelitian ini juga mengacu pada konsep Desa Mandiri yang dijelaskan dalam Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam regulasi tersebut, desa mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi.

Beberapa penelitian terdahulu turut menjadi landasan dalam penelitian ini. Alfina Damayanti dkk. (2023) memformulasikan strategi pembangunan desa mandiri melalui analisis SWOT. Christina Ompusunggu (2022) mengkaji pendekatan Dynamic Governance dalam proses menuju desa mandiri. Yoga Lesmana (2022) meneliti kapasitas organisasi BUMDes di Desa Tanjung Harapan, dengan fokus pada aspek sumber daya dan manajemen. Sementara itu, Astri Siti Fatimah (2019) mengkaji kapasitas kelembagaan dinas pemerintah daerah menggunakan model McKinsey.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus pada strategi, kelembagaan, atau unit organisasi tertentu seperti BUMDes, penelitian ini secara khusus menelaah kapasitas pemerintah desa sebagai organisasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Dengan mengacu pada teori kapasitas organisasi dan indikator IDM, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana kapasitas Pemerintah Desa Tanjung Harapan dalam mencapai status desa mandiri pada tahun 2023.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh kapasitas Pemerintah Desa Tanjung Harapan dalam mencapai status desa mandiri tahun 2023. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive, yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti kepala desa, perangkat desa, pendamping lokal desa, BPD, PKK, BumDes, Dinas PMD, dan tokoh masyarakat. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencapaian status desa mandiri tahun 2023 ini tidak terlepas dari kapasitas Pemerintah Desa Tanjung Harapan dalam mewujudkan status tersebut. Untuk melihat kapasitas pemerintah Desa Tanjung Harapan dalam mencapai status desa mandiri tahun 2023, penulis melakukan wawancara dan pengumpulan data untuk memperkuat penelitian dengan menggunakan teori kapasitas yang dikemukakan oleh Horton et al. (2003).

Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran krusial dalam mendukung kapasitas Pemerintah Desa Tanjung Harapan dalam mencapai status desa mandiri tahun 2023. Berdasarkan teori kapasitas Horton (2003), sumber daya yang termasuk dalam hard capacities, seperti infrastruktur, teknologi, keuangan, dan staf, menjadi faktor utama dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

1. Infrastruktur, Teknologi, dan Keuangan

Untuk mencapai status Desa Mandiri, Desa Tanjung Harapan perlu memenuhi beberapa indikator dalam Indeks Desa Membangun, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Ekonomi (IKE), dan Lingkungan (IKL). Pada indikator infrastruktur, Desa Tanjung Harapan sudah

membangun Poskamling di beberapa titik di setiap dusun untuk menjaga keamanan, meskipun jarang difungsikan karena tidak ada keadaan darurat. Ada juga satu Pos Linmas aktif di Dusun III yang dijaga bergiliran oleh warga. Fasilitas olahraga yang tersedia meliputi lapangan futsal, sepak bola, dan voli. Desa memiliki masjid sebagai tempat ibadah bagi masyarakat muslim dan satu Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk anak berkebutuhan khusus. Untuk kesehatan, terdapat empat posyandu aktif yang tersebar di tiga dusun. Di bidang pendidikan, Desa Tanjung Harapan memiliki PAUD Sinar Pelangi, perpustakaan desa, empat SD sederajat, dua SMP sederajat, dan dua SMA sederajat. Desa juga sudah berstatus Open Defecation Free (ODF) sejak 2015 dengan 812 KK yang memiliki jamban sendiri dan menyediakan dua titik pembuangan sampah agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan.

Di bidang ekonomi, Desa Tanjung Harapan memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah yang berdiri sejak 2016 dan dikelola langsung oleh masyarakat. BUMDes ini menjalankan berbagai usaha seperti produksi sabun cuci piring, layanan kesehatan, wahana permainan anak, penyewaan papan bunga, penyewaan molen, dan pengelolaan rumah kompos. Pemerintah desa juga membangun dan memperbaiki jalan desa untuk menunjang kegiatan ekonomi. Pengelolaan infrastruktur desa tidak hanya fokus pada ketersediaan aset, tapi juga mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dan kemampuan beradaptasi dengan kondisi wilayah. Kepala desa menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat, misalnya perbaikan posyandu, namun perbaikan hanya bisa dilakukan jika aset tersebut milik desa, bukan milik kabupaten karena aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan ketidaksesuaian antara data dalam kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Tanjung Harapan dengan kondisi nyata di lapangan. Pada dimensi modal sosial, kuesioner mencatat adanya lapangan tenis dan bulu tangkis, namun fasilitas tersebut tidak ditemukan. Di dimensi pendidikan, kuesioner mencatat empat SD/MI dan tiga SMA/MA, sedangkan observasi hanya menemukan tiga SD/MI dan dua SMA/MA. Pada dimensi ekonomi, kuesioner menyebutkan satu gudang pangan milik pribadi, tetapi tidak ditemukan di desa. Meskipun desa telah membangun berbagai infrastruktur pendukung IDM seperti poskamling, pos linmas, lapangan olahraga, sarana pendidikan, posyandu, PAUD, perpustakaan, serta berstatus ODF sejak 2015 dengan sanitasi layak dan listrik PLN, terdapat ketidaksesuaian data terkait fasilitas olahraga, jumlah sekolah, gudang pangan, serta belum adanya pasar, kantor pos, dan akses kredit usaha. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mencapai status Desa Mandiri belum sepenuhnya berhasil karena perbedaan data administrasi dan kondisi nyata, sehingga perlu evaluasi pendataan dan penguatan koordinasi agar data lebih akurat dan pembangunan lebih tepat sasaran.

Selanjutnya adalah teknologi. Teknologi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa Tanjung Harapan. Pemerintah desa telah memanfaatkan perangkat seperti PC, laptop, dan sejumlah aplikasi untuk menunjang pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan, seperti pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, pelayanan kesejahteraan sosial, dan pendataan aset desa. Aplikasi seperti Siskeudes digunakan untuk pencatatan keuangan secara otomatis dan akuntabel, sementara SIPD RI digunakan dalam perencanaan pembangunan yang terhubung langsung dengan Kementerian Dalam Negeri agar kebijakan lebih tepat sasaran. Penggunaan teknologi juga diterapkan pada bidang sosial dan pengelolaan aset. Pelayanan surat menyurat masih sebagian dilakukan secara manual, meskipun pembuatan surat telah menggunakan komputer. Aplikasi SIKS-NG digunakan untuk pendataan kesejahteraan sosial agar bantuan seperti PKH dan KIP tersalurkan tepat sasaran. Pengelolaan aset desa dilakukan melalui SIPADES untuk mencatat dan mengelola aset secara sistematis setiap tahun. Di bidang pemerintahan, aplikasi Prodeskel dan Epdeskel digunakan untuk pengumpulan data dan evaluasi perkembangan desa, mencakup potensi, permasalahan, dan tingkat perkembangan desa.

Meski penggunaan teknologi telah mempermudah pekerjaan perangkat desa, masih terdapat kendala teknis seperti gangguan server aplikasi yang menghambat input dan pembaruan data. Kendala ini terjadi karena aplikasi digunakan oleh banyak desa secara bersamaan. Di sisi lain, Pemerintah Desa Tanjung Harapan juga berupaya meningkatkan jaringan internet sebagai bagian dari peningkatan konektivitas masyarakat. Namun, kualitas sinyal masih belum merata, terutama di Dusun II Kampung Sergang yang sering mengalami gangguan, khususnya saat cuaca buruk. Secara umum, teknologi telah mendukung pencapaian Indeks Ketahanan Sosial (IKS), khususnya dalam hal transparansi dan efisiensi administrasi pelayanan publik. Penggunaan aplikasi seperti Siskeudes, SIKS-NG, SIPADES, Prodeskel, dan Epdeskel menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang baik. Namun, digitalisasi belum mencakup seluruh aspek layanan, seperti surat menyurat yang masih manual, yang menunjukkan perlunya peningkatan dalam integrasi sistem teknologi untuk mendukung pelayanan dasar pemerintahan.

Dalam dimensi Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), teknologi telah digunakan untuk perencanaan berbasis data melalui SIPD RI dan pengelolaan aset dengan SIPADES. Namun, pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengelolaan lingkungan masih terbatas. Internet yang belum merata menjadi hambatan, terutama dalam pengembangan potensi pariwisata. Belum adanya sistem informasi

kebencanaan atau pengawasan limbah juga menunjukkan bahwa penerapan teknologi belum menyentuh semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, meskipun teknologi telah digunakan, upaya menuju Desa Mandiri masih membutuhkan penguatan dan pemerataan pemanfaatan teknologi secara lebih komprehensif.

Desa Tanjung Harapan telah menunjukkan upaya nyata dalam mencapai status desa mandiri, salah satunya melalui pengelolaan sumber daya keuangan yang optimal. Sumber daya keuangan merupakan aspek krusial dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa memperoleh pendanaan dari beberapa sumber utama, antara lain Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (DBHRD), serta bantuan khusus dari pemerintah provinsi.

Tabel 4. 4 Rincian Anggaran Yang Diterima Pemerintah Desa Tanjung Harapan Tahun Anggaran 2023

Sumber Dana	Anggaran	Realisasi
Dana Desa (DD)	Rp795.304.000	Rp795.304.000
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp1.050.464.780	Rp1.046.443.244
Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (DBHRD)	Rp27.638.058	Rp27.638.058
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp8.000.000	Rp8.000.000
Bagi Hasil BUMDes	Rp944.000	Rp944.000
Bunga Bank	Rp2.000.000	Rp1.168.750

Sumber: Olahan Data Lapangan, 2023

Dalam rangka memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Tanjung Harapan menerapkan berbagai mekanisme pengawasan. Transparansi di buktikan dengan adanya laporan penggunaan anggaran dipublikasikan melalui baliho di depan kantor desa setiap tahunnya agar masyarakat dapat mengakses informasi keuangan desa. Selain itu, musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) dilakukan sebagai forum diskusi antara pemerintah desa dan masyarakat guna menetapkan prioritas penggunaan anggaran. Dengan adanya mekanisme ini, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan desa serta mengawasi penggunaan dana secara

langsung. Salah satu bentuk pengelolaan keuangan desa yang mendukung pembangunan berkelanjutan adalah alokasi anggaran yang mengutamakan prioritas kebutuhan masyarakat. Penggunaan keuangan desa yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan usulan dari masyarakat desa yang difasilitasi dalam musyawarah dusun terlebih dahulu. Setelah mendapatkan usulan dari masyarakat, maka akan dilakukan penjangkaran dan menyusun skala prioritas dalam penggunaan keuangan desa.

Pada tahun 2023, Desa Tanjung Harapan mengalokasikan dana sebesar Rp54.407.050 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan realisasi Rp54.053.600 dan dana sebesar Rp371.994.371 yang bersumber dari Dana Desa (DD) dengan realisasi Rp364.366.847 untuk pelaksanaan pembangunan desa. Selain pembangunan fisik, dana desa juga dialokasikan untuk bidang kesehatan serta pembayaran insentif bagi tenaga desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Desa Tanjung Harapan memberikan bantuan dana kepada berbagai lembaga seperti PKK, LPM, RT/RW, dan kelompok masyarakat lainnya untuk mendukung program pemberdayaan. Penyaluran dana dilakukan melalui pengajuan usulan kegiatan yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian diverifikasi sebelum ditetapkan program prioritas yang mendapat pendanaan. Selain itu, desa telah menerapkan sistem digitalisasi dengan aplikasi SiskeuDes untuk pencatatan anggaran yang lebih akurat dan efisien, sehingga memudahkan pemantauan realisasi dana sesuai rencana.

Meski pengelolaan keuangan desa sudah berjalan cukup baik, masih ada beberapa tantangan, terutama dalam pelaksanaan pembangunan seperti masalah tanah yang menyebabkan penundaan dan keterbatasan anggaran untuk memenuhi seluruh kebutuhan desa. Contohnya, Dana Desa (DD) dialokasikan untuk pembayaran gaji honorer dan kader posyandu yang bersifat rutin, sehingga pembangunan fisik hanya bisa dilakukan sebagian dan perubahan belum terlalu terlihat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa berusaha memaksimalkan pemanfaatan dana dengan menyusun skala prioritas, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas. Keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mendukung pembangunan.

2. Staf

Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia, yang menurut Horton terdiri dari prosedur perekrutan, ketersediaan dan potensi pegawai, serta pelatihan yang memadai, dengan kebutuhan utama adalah sumber daya

profesional dan kompeten yang mampu menjalankan tugasnya. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia juga mencakup kemampuan untuk mengikuti perkembangan bidangnya serta sikap terbuka dan kemauan untuk terus maju dan berkembang. Dalam konteks ini, staf yang dimaksud adalah perangkat desa dan staf pembantu Pemerintah Desa Tanjung Harapan, yang terdiri dari sekretaris, kasi pemerintahan, kasi pelayanan dan kesejahteraan, kaur keuangan, kaur tata usaha dan umum, kaur perencanaan, serta kepala dusun, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Tabel 4.5 Perangkat Desa/Staf Pembantu Pemerintah Desa Tanjung Harapan

Perangkat Desa/ Staf Pembantu	Jenis Kelamin	Kualifikasi Pendidikan
Sekretaris Desa	Laki-Laki	SMA
Kaur Perencanaan	Laki-Laki	SMA
Kaur Keuangan	Perempuan	SMA
Kaur Tata Usaha dan Umum	Laki-Laki	SMA
Kasi Pemerintahan	Perempuan	SMA
Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	Perempuan	SMA
Kepala Dusun I	Laki-Laki	SMA
Kepala Dusun II	Laki-Laki	SMA
Kepala Dusun III	Laki-Laki	SMA
Staf Kasi Pemerintahan	Laki-Laki	SMA
Staf Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	Laki-Laki	Strata 1 (S1)

Sumber: LPPDes Tanjung Harapan Tahun 2023

Pemerintah Desa Tanjung Harapan memiliki sembilan perangkat desa dan dua staf, dengan komposisi enam laki-laki dan tiga perempuan untuk perangkat desa, serta dua laki-laki sebagai staf. Rata-rata pendidikan perangkat desa adalah lulusan SMA, dengan satu orang berpendidikan Strata 1 (S1). Seluruh perangkat desa merupakan masyarakat asli desa yang diharapkan memahami kebutuhan desa untuk kesejahteraan masyarakat. Proses rekrutmen perangkat desa dilakukan secara terencana, dan tugas dibagi berdasarkan kompetensi masing-masing. Pemerintah desa juga rutin mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kinerja, pengetahuan, dan kemampuan perangkat desa, terutama dalam pengelolaan keuangan desa.

Selain pelatihan internal, pengembangan kemampuan perangkat desa juga didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lingga, yang memberikan motivasi dan pelatihan sesuai anggaran dan kebutuhan desa. Kepala Desa Tanjung Harapan secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi mingguan bersama perangkat desa untuk

mengatasi kendala dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun tingkat pendidikan penting, transparansi dalam perekrutan, pelatihan berkala, dan evaluasi menjadi faktor utama dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa. Dukungan dari Dinas PMD dan kerja sama dengan desa lain memberi peluang bagi perangkat desa untuk terus berkembang dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Manajemen

1. Kepemimpinan Strategis

Kepemimpinan strategis Kepala Desa Tanjung Harapan berperan penting dalam mengarahkan pembangunan desa menuju status desa mandiri. Kepala desa tidak hanya menetapkan arah strategis pembangunan, tetapi juga aktif menilai kebutuhan masyarakat dan menetapkan program prioritas seperti peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan terhadap UMKM. Salah satu contohnya adalah pemberian bantuan mesin pengolahan ikan untuk meningkatkan produksi bakso ikan, yang kini menjadi produk unggulan desa. Selain itu, visi kepala desa untuk menjadikan desa unggul dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan ekonomi diterjemahkan dalam kegiatan rutin seperti pengarahan mingguan kepada perangkat desa untuk menjaga koordinasi dan efektivitas pelaksanaan tugas.

Kepala desa juga membangun komunikasi yang terbuka dengan perangkat desa dan masyarakat melalui musyawarah dan pertemuan rutin, serta memberikan ruang konsultasi yang fleksibel. Dalam proses perencanaan pembangunan, keterlibatan masyarakat menjadi prioritas agar setiap kebijakan benar-benar sesuai kebutuhan warga. Upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dilakukan melalui pelibatan semua pihak, serta evaluasi rutin terhadap kinerja dan pelaksanaan program. Evaluasi ini dibantu oleh Dinas PMD Kabupaten Lingga melalui laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPDes), yang menjadi acuan dalam menilai efektivitas penggunaan anggaran dan keberhasilan program pembangunan.

Selain itu, aspek keamanan dan ketertiban masyarakat juga diperhatikan dengan pelaksanaan ronda malam dan penyelesaian konflik melalui musyawarah RT/RW. Kepala desa turut mendorong perangkat desa untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan mengikuti aturan, serta memastikan bahwa setiap kendala dapat segera ditangani. Dengan pendekatan kepemimpinan yang responsif, partisipatif, dan terarah, kepala desa berhasil menciptakan iklim kerja yang produktif dan pelayanan publik yang lebih optimal, serta memperkuat fondasi menuju desa yang mandiri dan berdaya saing.

2. Manajemen Program dan Manajemen Proses

Manajemen program di Desa Tanjung Harapan dimulai dari proses perencanaan yang mengacu pada RPJMDes 2021–2027. Perencanaan disusun melalui tahapan musyawarah mulai dari tingkat dusun hingga desa, guna menampung aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Setelah itu, disusun dan disahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai dasar pelaksanaan program. Pelaksanaan program dilakukan dengan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat. Program pembangunan fisik, seperti infrastruktur jalan dan fasilitas umum, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas yang telah disepakati bersama. Pemerintah desa juga memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik melalui penyediaan Posyandu, PAUD, perpustakaan, BUMDes, dan petugas kebersihan desa.

Dalam pelaksanaan program, kepala desa dan perangkat desa bertanggung jawab memastikan kegiatan sesuai perencanaan, anggaran, dan waktu pelaksanaan. Masyarakat juga ikut dilibatkan dalam pelaksanaan dan pengawasan melalui gotong royong dan forum musyawarah. Setelah pelaksanaan, dilakukan pelaporan melalui dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukannya. Pemerintah desa juga menerapkan sistem pengelolaan internal yang efisien, termasuk penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Sumber dana desa berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHRD), serta bantuan dari provinsi. Transparansi anggaran diwujudkan dengan pemasangan baliho laporan keuangan dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) secara terbuka.

Pemerintah Desa Tanjung Harapan juga aktif meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan rutin, termasuk kerja sama pelatihan lintas desa. Evaluasi kinerja dilakukan setiap minggu melalui pertemuan "Briefing Morning" dan setiap tiga bulan bersama RT/RW. Pengelolaan aset dan fasilitas desa juga menjadi perhatian penting, dengan alokasi dana setiap tahun untuk sektor kesehatan, pendidikan, permukiman, dan lingkungan. Desa turut mendukung pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes dengan penyediaan kios, penyertaan modal, dan pembinaan ketahanan pangan. Secara keseluruhan, keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan yang transparan, dan pengelolaan internal yang profesional.

3. Jaringan dan Hubungan

Pemerintah Desa Tanjung Harapan berhasil menjalin hubungan yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk Dinas PMD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, dalam rangka memperkuat kapasitas desa menuju status desa mandiri. Dinas PMD memberikan

pendampingan melalui pelatihan dan pembinaan terkait tata kelola desa, pengelolaan keuangan, dan penggunaan aplikasi administrasi desa, sementara Dinas Kesehatan mendukung pembangunan serta operasional posyandu yang tersebar di tiga dusun. Selain itu, pemerintah desa juga bekerja sama dengan kepolisian dalam menjalankan program Kampung Bebas Narkoba untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat.

Hubungan internal dalam pemerintahan desa juga berjalan baik, seperti kerja sama erat antara pemerintah desa dengan BPD dalam perumusan dan pengawasan kebijakan. Pemerintah desa juga mendukung penuh operasional BUMDes melalui koordinasi rutin dan dukungan anggaran, meskipun kerja sama dengan pihak swasta masih terbatas karena kendala regulasi. Di sisi lain, sinergi antara pemerintah desa dan PKK terjalin erat dalam program pemberdayaan masyarakat, seperti kegiatan rembuk stunting dan ketahanan pangan, dengan dukungan infrastruktur dan kaderisasi yang merata di seluruh dusun.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa juga sangat tinggi, terlihat dari partisipasi dalam musyawarah desa dan gotong royong. Rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) disusun bersama masyarakat dan BPD, menjadikan setiap program pembangunan berbasis aspirasi warga dan minim konflik. Secara keseluruhan, keberhasilan Desa Tanjung Harapan menjadi desa mandiri pada 2023 tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa membangun jaringan kerja yang luas dan hubungan internal yang harmonis, yang menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah Desa Tanjung Harapan telah menunjukkan kemajuan dalam membangun kapasitas organisasinya menuju status desa mandiri tahun 2023, berdasarkan indikator sumber daya dan manajemen menurut teori Douglas Horton dkk (2003). Dari sisi sumber daya, desa telah memiliki infrastruktur dasar seperti posyandu, sekolah, BUMDes, dan perangkat desa yang menggunakan aplikasi digital dalam pengelolaan administrasi dan keuangan, meskipun masih terdapat kendala seperti gangguan jaringan dan penggunaan manual dalam surat-menyerurat. Dari sisi manajemen, pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan melalui musyawarah, menjaga transparansi anggaran, serta meningkatkan kapasitas perangkat melalui pelatihan. Meski demikian, kemitraan dengan sektor swasta masih terbatas, dan BUMDes belum optimal dalam mendorong kegiatan ekonomi. Penelitian juga menemukan ketidaksesuaian antara data kuesioner IDM dan kondisi faktual di lapangan, seperti fasilitas olahraga dan jumlah sekolah yang tidak sesuai kenyataan, menunjukkan bahwa status desa mandiri secara administratif belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil. Oleh karena itu,

diperlukan pembenahan melalui penguatan kapasitas internal, pemerataan pemanfaatan teknologi, dan pembaruan data berbasis kondisi aktual. Upaya seperti pengajuan proposal kerja sama ekonomi ke pelaku usaha dan sektor swasta melalui MoU juga telah dilakukan untuk pengembangan unit usaha desa. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam efektivitas kapasitas pemerintah desa dalam mencapai status desa mandiri serta kontribusi program tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Aisah, Ichda Umul, and Herdis Herdiansyah. 2019. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi." *Share : Social Work Journal* 9(2).
- Anjelita, Budiman, and Jumansyah. 2020. "Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Status Desa Menuju Desa Mandiri (Studi Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur)." *Jurnal Sosial Politika* 1(2).
- Damayanti, Alfina, Deni Fauzi Ramdani, Hendrikus T Gedeona, and Siti Widharetno Mursalim. 2023. "Strategi Mewujudkan Pembangunan Desa Mandiri (Studi Kasus Pada Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung)." *Konferensi nasional Ilmu Administrasi* 7.0 7(1).
- Fatimah, Astri Siti. 2019. "Kapasitas Kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya." *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 4(1): 1–11.
- Garvera, R Rindu, Fachmi Syam Arifin, and Anisa Nurul Fazrilah. 2021. "*Collaborative Governance* Dalam Mewujudkan Desa Mandiri." *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 8(3): 502–13.
- Setiawan, Agustina, Widuri Wulandari, and Siti Munawaroh. 2024. "Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Academia Praja* 7(1): 15–27.
- Suherman, Maman, and Neni Rohaeni. 2023. "Efektivitas Program Desa Mandiri Dalam Mencapai Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung)." *Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer* 7(3): 1534–42. <http://doi.org/10.33395/remik.v7i3.12846>.
- Utama, Diar Budi et al. 2020. "Kapasitas Pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas Dalam Pengurangan Risiko Bencana." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7(3): 591–606.

Skripsi

- Agustina, P. (2020). Strategi Pemerintah Desa Toapaya Selatan dalam Upaya Menuju Desa Mandiri. Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Lesmana, Y. (2022). Kapasitas Organisasi BumDes di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Tahun 2023. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

- Ompusunggu, C. (2022). *Dynamic Governance* dalam Upaya Desa Toapaya Selatan Mewujudkan Desa Mandiri di Tahun 2023. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Tauhid. (2022). Strategi Pemerintah Desa Malang Rapat Mewujudkan Desa Mandiri Melalui Aspek Ketahanan Ekonomi. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Buku

- Horton, D., Alexaki, A., Bennett-Lartey, S., Brice, K. N., Campilan, D., Carden, F., Silva, J. De S., Duong, L. T., Khadar, I., Boza, A. M., Muniruzzaman, I. K., Perez, J., Chang, M. S., Vernoooy, R., Watts, J., & Isnar. (2003). *Evaluating Capacity Development Experiences From Research And Development Organizations Around The World. In International Service For National Agricultural Research (Isnar), The Netherlands; International Development Research Centre (Idrc), Canada; And Acp-Eu Technical Centre For Agricultural And Rural Cooperation (Cta).* [Http://Search.Ebscohost.Com/Login.aspx?Direct=True&Db=Bth&An=16602244&Site=Ehost-Live](http://search.ebscohost.com/Login.aspx?Direct=True&Db=Bth&An=16602244&Site=Ehost-Live)
- Kurniawan, B. (2015). Desa Mandiri, Desa Membangun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Priyono, B. S., Osira, Y., Sukiyono, K., Nabiu, M., Yuliasro, M. Z., Widiono, S., Arianti, N. N., Novanda, R. R., & Revina, R. (2019). Menuju Desa Mandiri. Pusdatin Balilaflo.

Laporan Instansi dan peraturan

- Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023, (2023).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, (2016).
- Pemerintah Desa Tanjung Harapan. 2023. LPPDes Tahun Anggaran 2023. Kabupaten Lingga: Pemerintah Desa Tanjung Harapan.
- Pemerintah Desa Tanjung Harapan. 2024. LPPDes Tahun Anggaran 2024. Kabupaten Lingga: Pemerintah Desa Tanjung Harapan.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014)